



**PENGUMUMAN**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF  
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MURIDI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 93552

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

- |    |  |     |             |
|----|--|-----|-------------|
| 1. | Tanah Seluas 186 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.587.440                      | Rp. | 625.587.440 |
| 2. | Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/180 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000 |     |             |

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

- |    |  |             |     |             |
|----|--|-------------|-----|-------------|
| 1. | MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR<br>HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000               | Tahun 2008, | Rp. | 133.000.000 |
| 2. | MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR<br>HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000               | Tahun 2009, |     |             |
| 3. | MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR<br>HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000               | Tahun 2012, |     |             |
| 4. | MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000 |             |     |             |

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 930.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

Sub Total

Rp. 759.517.440

**III. HUTANG**

Rp. 280.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 479.517.440

Catatan

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**